

Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013 dan Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Bekerjasama dengan TNP2K dan PRSF

Temu Berbagi Penelitian 2014-2015
Jakarta, 31 Maret 2015

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program BLSM 2013

- Kompensasi dari kenaikan BBM pada 22 Juni 2013
- Sasaran: 15,5 juta (25%) rumah tangga Indonesia dengan tingkat kesejahteraan terendah
- Mekanisme:
 - Bantuan tunai Rp150.000 per bulan (4 bulan)
 - Disalurkan 2 kali: Juni/Juli dan September/Oktober 2013
 - Menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
 - ➔ untuk mengakses Raskin dan Bantuan Siswa Miskin-BSM



Tampak depan



Tampak belakang

Program perlindungan sosial selalu menghadapi permasalahan dalam beberapa hal

➔ Perlu monev untuk memperbaiki pelaksanaan dan pembelajaran bagi program lain

Tujuan dan Metode Penelitian

- Tujuan: mendapatkan gambaran pelaksanaan BLSM dan penggunaan KPS untuk Program BSM dan Raskin
- Metode Penelitian: Kualitatif
 - Wawancara mendalam
 - *Focus group discussion (FGD)*
- Kunjungan lapangan: Februari – Maret 2014
- Lokasi: 10 kabupaten/kota di 5 provinsi
 - Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga (Sumut),
 - Kabupaten Demak dan Kota Semarang (Jateng),
 - Kabupaten Cianjur dan Kota Sukabumi (Jabar),
 - Kabupaten Bima dan Kota Bima (NTB),
 - Kabupaten Barru dan Kota Makassar (Sulsel)

Temuan (1)

Secara umum, pelaksanaan BLSM berjalan lancar dan rendah konflik

Sosialisasi:

- Terbatas: tentang mekanisme pencairan dan untuk koordinasi/pengamanan pencairan
- Terlambat: Setelah pencairan tahap I

Ketepatan sasaran:

- *Inclusion errors rendah* (umumnya penerima rumah tangga miskin dan sangat miskin)
- *Exclusion error cukup tinggi* (banyak rumah tangga miskin dan ada yang sangat miskin tidak menerima)

Pencairan dana:

- Umumnya dicairkan oleh pemilik KPS
- Umumnya dana diterima secara penuh

KPS Retur 0% - 25% per desa/kelurahan



Temuan (2)

KPS sudah digunakan dalam BSM

- Umumnya sekolah sudah memprioritaskan siswa dari rumah tangga pemilik KPS dalam pengusulan penerima BSM.
- Tidak semua siswa dari rumah tangga pemilik KPS menjadi penerima BSM
 - Keterbatasan sosialisasi
 - Kesalahan pemahaman sekolah: satu anak per rumah tangga atau hanya anak yang tercantum di KPS
 - Sekolah membatasi usulan jumlah anak per rumah tangga

Temuan (3)

Penggunaan KPS dalam Raskin sangat terbatas

- Hanya di satu kelurahan studi KPS digunakan sesuai ketentuan
- Di sebagian kecil wilayah studi: rumah tangga pemilik KPS mendapat prioritas
- Di sebagian besar wilayah studi: tidak mempertimbangkan kepemilikan KPS

Rekomendasi

- Program yang melibatkan pemangku kepentingan secara masif membutuhkan perencanaan matang dan persiapan yang cukup
- Sosialisasi harus dilakukan sebelum program dimulai dan dapat menjamin sampainya informasi program yang memadai kepada semua pemangku kepentingan
- Verifikasi data penerima program harus dilakukan menjelang program dilaksanakan
- Harus ada ketegasan dan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin KPS digunakan sesuai aturan

TERIMA KASIH



Tim Peneliti:

Hastuti

Bambang Sulaksono

Sulton Mawardi

Akhmadi

Rahmitha

Valentina Utari

Dyan Widyaningsih

Dinar Prasetyo

Kartawijaya

Toward Pro-poor Policy through Research

www.smeru.or.id



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



SMERU Research Institute